



**Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Di Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Pada SMP Negeri 2 Telukjambe Timur, Karawang**

**Elly Fitriyani<sup>1</sup>, Hanny Purnamasari<sup>2</sup>, Dadan Kurniansyah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [1810631180009@student.unsika.ac.id](mailto:1810631180009@student.unsika.ac.id)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Maret 2022

Direvisi: 10 Maret 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6358157

---

**Abstract:**

*Public policy is the setting of goals and suggestions as well as decisions that are marked by choices or actions that have an impact on the government's decision to or not to do something that aims to achieve goals so that it can be useful for society. One of the policies made by the government as an alternative solution to problems that arise in the world of education during the COVID-19 pandemic is to prevent learning loss. SMP Negeri 2 Telukjambe Timur Karawang is a school that has met the requirements for implementing PTM in the period September-January 2022. An evaluation of the PTM policy organized by SMP Negeri 2 Telukjambe Timur needs to be done considering the urgency of face-to-face learning for students, although now Limited PTM is being abolished because the presence of a new variant of the virus which is claimed to be more dangerous. This study uses a qualitative descriptive research design which in this study aims to elaborate policy implementation by using William N Dunn's policy evaluation which consists of six indicators, namely; effectiveness, efficiency, assessment, equity, responsiveness, and accuracy.*

**Keywords:** *Public policy evaluation, face-to-face learning (PTM) Limited*

---

**PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan virus yang sampai detik ini sedang menyerang dan mewabah di seluruh penjuru dunia termasuk Negara Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam semua sektor kehidupan. Pemerintah dalam rangka menekan penyebaran virus ini membuat kebijakan

untuk membatasi atau menghentikan segala aktivitas yang melibatkan orang banyak (berkerumun) dengan alasan mudahnya penyebaran virus Covid-19. Sehingga segala aktivitas seluruhnya dihentikan, baik dari aspek pekerjaan, pendidikan, kebiasaan dan sebagainya (Khasanah et al., 2020)

Pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko penularan virus Covid-19. Pemerintah menganjurkan dan mewajibkan kepada semua masyarakat Indonesia untuk membudayakan 3M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun dan kapanpun. Salah dua kebijakan pemerintah Indonesia selama pandemi yaitu : (PSBB) Pembatasan Sosial Berskala Besar dan (PPKM) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Kehadiran *corona virus disease-19* ini, tak dapat dipungkiri telah memberikan pengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan *corona virus disease-19*. Penyesuaian tersebut terdapat dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. Selanjutnya serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan seiring perkembangan penyebaran Covid-19, seperti pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan online untuk proses pendaftaran siswa sesuai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). (*Diakses penulis dari laman <https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/pada-14-Januari-2022>*).

Sektor pendidikan adalah sektor yang memiliki andil sangat besar dalam pengembangan sumber daya manusia di sebuah wilayah. Dinamika pendidikan di Kabupaten Karawang dengan kehadiran

pandemi covid-19 menjadi lebih bervariasi, proses belajar mengajar yang mejadi ciri khas dari dunia pendidikan mengalami beberapa penyesuaian hal tersebut terjadi berdasarkan arahan dari pemerintah pusat serta menteri pendidikan. Salah satunya yakni kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, Pelaksanaan PTM terbatas ini digadang-gadang menjadi solusi untuk mencegah *learning loss*.

Urgensi pelaksanaan PTM terbatas ini sangat penting mengingat banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang dianggap cukup sulit apabila diajarkan secara *daring*. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat dari Husamah (2015) dalam (Khasanah et al., 2020), yang mengemukakan bahwa secara umum, pembelajaran tatap muka memiliki berbagai kelebihan terhadap pengajar maupun peserta didik, antara lain: 1. Memudahkan pemberian penguatan (*reinforcement*) dengan segera; 2. Disiplin formal yang diterapkan pada pembelajaran tatap muka dapat membentuk disiplin mental; 3. Menjadi wahana belajar berinteraksi terhadap peserta didik; 4. Memudahkan proses penilaian oleh pengajar.

Pelaksanaan PTM terbatas ini berlandaskan SKB 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Adapun syarat bagi sekolah atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan melakukan PTM terbatas yaitu ; Bagi satuan pendidikan yang ingin melaksanakan PTM terbatas, maka harus mengikuti ketentuan diantaranya 33 persen untuk jenjang PAUD, 50 persen untuk jenjang SD dan SMP, persetujuan dari orang tua/wali, pihak sekolah harus melakukan koordinasi secara konsisten dengan pihak puskesmas dan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, kemudian ketentuan lainnya yaitu, semua guru dan tenaga

kependidikan telah divaksin secara lengkap. Mempunyai fasilitas pendidikan yang sesuai protokol kesehatan, memiliki dan melaksanakan SOP pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19, serta mendapat persetujuan dari orangtua siswa dan komite sekolah selanjutnya pemberlakuan PTM terbatas di Karawang ini juga mendapatkan syarat tambahan dari bupati karawang yakni setiap satu minggu akan dilakukan testing kepada guru dan anak-anak didik dengan swab antigen, swab antigen tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah. Tujuannya untuk mencegah munculnya kluster penularan baru setelah PTM diberlakukan.

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek sejumlah 490.217 sekolah telah melakukan PTM Terbatas per tanggal 14 September 2021. Sedangkan di karawang sendiri PTM terbatas dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan zona wilayah covid-19 dan berapa persen siswa serta tenaga pengajar yang telah melakukan vaksinasi. Pemerintah kabupaten Karawang berencana agar PTM terbatas dapat dilaksanakan 100% pada bulan Desember 2021, perencanaan tersebut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PTM terbatas yang dinilai telah berhasil oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang.

Salah satu sekolah di wilayah kabupaten karawang yang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan PTM terbatas yakni SMP N 2 TelukJambe Timur, SMP ini terletak di Desa Sukaluyu dengan jumlah peserta didik kurang lebih 1.382 dari kelas 1, 2, dan 3. Sekolah ini menyelenggarakan PTM terbatas sejak pertengahan bulan September 2021 sesuai instruksi dari pemerintah Kabupaten Karawang. Mengingat pentingnya pelaksanaan kebijakan PTM terbatas ini berjalan dengan baik.

Melihat urgensi dari implementasi peraturan tersebut pada sekolah sebagai instansi yang menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi sekarang ini, maka dalam mengevaluasi penerapan

kebijakan PTM terbatas ini diperlukan indikator dalam penilainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mempertanyakan apakah pelaksanaan PTM terbatas tersebut sudah sesuai? Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait evaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi covid-19: studi kasus pada SMP Negeri 2 Telukjambe Timur, Karawang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51) dalam (Maelin et al., 2018) kebijakan didefinisikan dari asal kata yang menyusunnya. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota) dan apabila diterjemahkan berarti suatu pedoman dasar atau rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang menyangkut Negara dan Kota.

Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006:53), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

- a) Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (*as a label for a field of activity*) Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
- b) Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (*as expression of general purpose or desired state of affairs*) Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
- c) Sebagai proposal spesifik (*as specific proposal*) Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.

- d) Sebagai keputusan pemerintah (*as decesions of government*) Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.
- e) Sebagai otorisasi formal (*as formal authorization*) Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.
- f) Sebagai sebuah program (*as a program*) Contohnya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.
- g) Sebagai output (*as output*) Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.
- h) Sebagai hasil (*as outcome*) Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agraria.
- i) Sebagai teori atau model (*as a theory or model*) Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka *output industry* akan berkembang.
- j) Sebagai sebuah proses (*as a process*) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah pedoman dasar atau rangkaian konsep, asas atau dasar rencana dalam pelaksanaan suatu

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan.

### **Kebijakan Publik**

Thomas R. Dye (Anggara, 2014:35) dalam (Khusnah, 2021) menjelaskan kebijakan publik yaitu semua yang dilakukan maupun tidak dilakukan, dengan suatu alasan kebijakan harus diselesaikan untuk membantu kehidupan bersama, serta menjadi pemikiran yang komprehensif. Kebijakan secara umum berpengaruh pada semua masyarakat dan tidak memberi kerugian, sehingga pemerintah harus cerdas dalam menentukan keputusan.

Selanjutnya, baik Simon maupun Laswell dalam (Muhiddin, 2017) kebijakan publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun dalam aplikasinya membutuhkan keterlibatan ilmu-ilmu lain, terutama dalam ilmu sosial. Dengan begitu kebijakan publik, baik dalam tataran konsep maupun dalam aplikasinya tidak bisa bekerja secara maksimal jika tidak dibantu dengan disiplin ilmu lain, karena itulah disebut sebagai ilmu yang multidisipliner.

Dari definisi diatas bisa disimpulkan, kebijakan publik merupakan serangkaian tujuan dan saran serta keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi pada suatu pilihan atau tindakan sehingga menghasilkan suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat.

### **Konsep Evaluasi**

Menurut Vedung, "*Evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things*". Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991 : 356): Evaluasi merupakan sebuah kata elatis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata tersebut secara umum adalah suatu istilah untuk menimbang manfaat. Seorang mengamati dan meneliti

suatu fenomena (seseorang, sebuah benda maupun gagasan) yang didasarkan pada beberapa ukuran eksplisit dan implisit. Untuk memperkuat pendapat tersebut, Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari proses serta program pemerintah. Evaluasi menurut Widodo dalam (Widodo, 2007) adalah kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Apabila dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya. Menurut Lester dan Stewart (2000 : 126) dalam (Agustino, 2012) menyatakan bahwa :

“Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.”

Adapun William N. Dunn (1999) dalam (Nugroho, 2014) sebagai salah satu ahli menyatakan bahwa, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Informasi yang valid tersebut dapat dipercaya terkait kinerja kebijakan, seperti seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target. (Nugroho, 2014).

### **Evaluasi kebijakan**

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan atau tahap akhir dari suatu proses kebijakan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif (Maelin et al., 2018).

Adapun dimensi evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Melanjutkan definisi di atas, Langbein dalam (Widodo, 2007) membedakan tipe riset evaluasi kebijakan publik menjadi dua macam, yaitu:

1. Tipe evaluasi proses, yaitu riset evaluasi yang didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan;
2. Tipe evaluasi hasil, yaitu riset yang didasarkan pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana capaian atau apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.

### **Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas**

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, PTM Terbatas adalah pengaturan jumlah peserta didik di setiap kelas sehingga menjadi lebih sedikit dari jumlah normal. Pengaturan juga dilakukan pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk belajar. Jumlah kursi dikurangi dan jaraknya diatur sesuai prokes. Kemudian dari aspek materi pembelajaran, dalam PTM terbatas yang

diberikan hanyalah materi yang paling esensial.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam atau elaborasi sosial bukan terpaku pada numerik. Kualitatif adalah jenis metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari beberapa makhluk akan permasalahan sosial yang ada (Creswell, 2016).

Jenis penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah studi kasus, dimana peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam dan melakukan pengumpulan informasi yang lengkap berdasarkan pada prosedur dan waktu pengumpulan data yang telah ditetapkan (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mempunyai tiga format. Ketiga format tersebut terdiri dari penelitian deskriptif, verifikasi dan format *Grounded research* (Koenjaraningrat, 1997). Korelasi antara kualitatif dan deskriptif yakni penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail (Bogdan & Taylor, 1975). Sehingga peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah dan mendapatkan tujuan dari penelitian yakni data tentang penerapan kebijakan PTM terbatas di sekolah yang menjadi lokus penelitian.

Guna mendukung penggunaan teknik *non-probability sampling*, peneliti akan menggunakan *snowball sampling* dan *purposive sampling*. *Purposive sampling* berarti pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017) misalnya informan yang bertanggung jawab mengawasi jalannya penerapan kebijakan tersebut, serta peserta didik yang berpartisipasi dalam PTM terbatas.

**Tabel 1 Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Wakasek Kurikulum	1 Informan
2	Satgas Covid-19 di SMP N 2 Telukjambe Timur	1 Informan
3	Siswa	3 Informan
4	Wali Murid	3 Informan
5	Pegawai Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Karawang	1 Informan
	Total Informan	9 Informan

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) dilakukan secara intens sampai data yang didapat menemui kejenuhan. kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan dalam tiga proses yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas Pada Masa Pandemi Covid-19 : Studi Kasus Pada SMPN 2 Telukjambe Timur

#### 1. Efektivitas

Dalam dimensi efektifitas, indikator yang dinilai adalah pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas berekenanaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau dalam hal ini adalah mencapai tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas seperti yang dituliskan oleh Kemdikbudristek RI bahwa diberlakukannya PTM Terbatas bertujuan untuk mencegah kehilangan pengalaman belajar siswa (*learning loss*). Seperti yang kita tahu bahwa saat pertama kali terjadi pandemi Covid-19 sekolah ditutup dan dialihkan pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menekan penyebaran Covid-19. Pada pelaksanaan PJJ banyak ditemukan

dampak negatif bagi siswa seperti kemunduran kemampuan belajar dan menurunnya capaian belajar siswa. Untuk itu pemerintah melalui Kemendikbudristek mengupayakan agar siswa dapat tetap belajar disekolah di tengah pandemi Covid-19 dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hasil wawancara yang dilakukan di SMPN 1 Telukjambe Timur bersama Ibu Nurkini selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum beliau mengatakan bahwa : “PTM terbatas dilakukan untuk mencegah *learning loss* atau hilangnya pengalaman belajar siswa, seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif. Untuk itu saat ini diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Menurut saya kebijakan PTM sedikitnya sudah membantu siswa belajar lebih baik dibandingkan dengan PJJ, meskipun kebijakan ini belum sepenuhnya mencegah *learning loss* karena masih harus daring juga namun dengan adanya PTM Terbatas kita bisa mengurangi resiko tersebut”

Andri selaku siswa kelas 8D mengatakan bahwa:

“Waktu sekolah daring aku selalu malas ngerjain tugas dan malas ikut kelas, karena capek dan ditambah gak ngerti sama materi yang di sampaikan guru, sekarang lebih enak bisa masuk sekolah walaupun gak setiap hari, sekarang udah mulai ngerti sama materi sekolah, soalnya materi disampaikan langsung sama guru, ada diskusi juga di kelas, jadi lebih paham”

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas mampu mengurangi resiko terjadinya *learning loss*. Dengan diberlakukannya PTM Terbatas siswa bisa lebih mengerti materi yang disampaikan guru dan memiliki pengalaman belajar di sekolah meskipun belum maksimal karena hanya masuk sekolah 2 kali dalam seminggu.

## 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun menurut William Dunn Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PTM Terbatas merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Protokol kesehatan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan PTM Terbatas ini. Agar tujuan dari PTM Terbatas ini tercapai sekolah harus memperhatikan protokol kesehatan agar siswa maupun guru bisa melakukan belajar mengajar dengan nyaman dan aman. Untuk itu SMPN 2 Telukjambe Timur terus berupaya membuat PTM Terbatas ini aman bagi siswa dan guru. Dalam penyelenggaraan PTM Terbatas ini, SMPN 2 Telukjambe Timur sudah sesuai dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Dimana usaha-usaha yang dilakukan SMPN 2 Telukjambe Timur adalah sebagai berikut : Mewajibkan Vaksin Bagi Pendidik dan Siswa, Membentuk satgas covid-19 di sekolah, Menyediakan infrastruktur sesuai standar proses, melakukan kombinasi metode pembelajaran (tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh).

## 3. Kecukupan

Kecukupan dalam konteks kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan yang dicapai setelah pelaksanaan kebijakan tersebut serta dirasa sudah dapat menyelesaikan masalah yang terdapat pada objek kebijakan. (Andi, 2017). Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang sebelumnya diterapkan untuk mencegah terjadinya *learning loss* dirasa belum bisa menyelesaikan masalah kemunduran belajar siswa. PTM Terbatas menerapkan metode pembelajaran campuran atau *hybrid learning*. Dimana metode ini mengharuskan siswa belajar di rumah (daring) dan belajar di sekolah (PTM Terbatas). Dimana setiap siswa di SMPN 2 Telukjambe Timur hanya bisa bersekolah

selama 2 kali dalam seminggu dan hari yang lainnya belajar daring (dalam jaringan). Dengan begitu PTM Terbatas dengan menggunakan metode pembelajaran *hybrid learning* tidak bisa menjadi solusi terbaik karena pembelajaran yang diterima siswa tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah kurikulum, beliau mengatakan bahwa :

*“Pembelajaran tatap muka terbatas belum sepenuhnya memberikan solusi bagi permasalahan pendidikan di masa pandemi ini karena dalam PTM Terbatas ini siswa masih diharuskan belajar di rumah (daring) dan belajar di sekolah. Yang dimana kebijakan ini pun sebenarnya sedikit menambah kerja guru yang harus mengatur jadwal antara belajar daring dan belajar di sekolah, namun demikian hal ini menjadi bahan pembelajaran untuk kami jika nanti bisa sekolah full 100% kami selaku tenaga pengajar sudah siap dengan protokol kesehatan dan yang lainnya”*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis jelaskan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan PTM Terbatas ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan learning loss karena kebijakan ini hanya memberikan kesempatan belajar disekolah diwaktu yang terbatas dan siswa masih tetap belajar daring dari rumah.

#### **4. Pemerataan (*equity*)**

Pemerataan atau dikenal juga dengan (kesamaan), Dimensi ini memfokuskan pada distribusi dari jenis program yang telah diterapkan, apakah kebijakan ini diterapkan secara merata kepada target/sasaran kebijakan. Pada penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini SMPN 2 Telukjambe Timur ini semua siswa diperbolehkan untuk mengikuti proses belajar yang

telah ditetapkan meskipun belum menerima vaksin. Namun apabila wali siswa belum memberikan izin untuk anaknya mengikuti sekolah tatap muka terbatas, sekolah mengizinkan untuk tetap sekolah daring. Wakasek Kurikulum mengatakan bahwa :

*“Dari total peserta didik yang mencapai 1395 semuanya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas yang dibagi per hari dan persesi, hanya ada satu siswa saja yang sampai saat ini belum diizinkan orang tuanya untuk belajar di sekolah”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bisa dikatakan bahwa kebijakan PTM Terbatas ini sudah diikuti oleh hampir seluruh siswa yang artinya kebijakan ini diterapkan secara merata kepada setiap siswa.

#### **5. Responsivitas**

Responsivitas indikator yang dinilai adalah kesesuaian pilihan kebijakan terhadap masalah publik. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan target kebijakan atau tidak lalu apakah kebijakan ini memuaskan untuk semua pihak atau tidak. Dalam hal ini apakah kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh para siswa dan tenaga pengajar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMPN 2 Telukjambe Timur mayoritas siswa memberikan respon positif mengenai kebijakan PTM Terbatas ini. Seperti yang diungkapkan oleh Odion Natandavin kelas 8J.

*“Senang banget bisa sekolah lagi, bisa lebih ngerti pelajaran dibandingkan dibandingkan PJJ yang kadang susah sinyal”*

Kemudian hal senada juga disampaikan Dara siswi kelas 8K. Dara mengungkapkan bahwa *“lebih enak sekolah tatap muka, cepet*

*ngerti pelajaran gak kaya sekolah online yang kurang ngerti pelajaran, kadang suka males juga belajar di hp terus, suka bosan dan capek, sekarang udah enak bisa sekolah tatap muka, seneng juga ketemu temen-temen”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sudah menjawab permasalahan yang ada, dimana dalam hal ini kebijakan PTM terbatas telah mengurangi resiko terjadinya *learning loss*.

## 6. Ketepatan

Dimensi ketepatan digunakan untuk menilai implementasi dari kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ini apakah sudah tepat dalam memberikan manfaat bagi target/sasaran kebijakan dalam hal ini siswa dan tenaga pengajar. Wakasek Kurikulum mengungkapkan bahwa

*“Semenjak diberlakukan PTM Terbatas siswa menjadi lebih paham materi dan lebih aktif belajarnya, lebih rajin dan lebih semangat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh yang terkadang banyak siswa yang lebih memilih membolos pelajaran dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian hal serupa juga juga di ungkapkan oleh Irma Nuraini siswa kelas 8J “Sejak sekolah tatap muka aku lebih semangat belajarnya, lebih ngerti pelajaran, tidak malas ngumpul tugas, terus nilai ku juga lebih bagus ketika PTM dibandingkan dengan sekolah daring, sekolah daring suka remedial terus karena karena pernah dijelaskan pelajarannya”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Guru dan siswa SMPN 2 Telukjambe Timur, dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sudah tepat untuk dilaksanakan di masa Covid-19 periode september sampai februari 2022, namun

seiring dengan hadirnya varian virus baru maka PTM terbatas tersebut harus ditiadakan dan kembali kepada system pembelajaran jarak jauh.

Untuk mengafirmasi pernyataan dari pihak sekolah, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa wali siswa, yang mana hasil dari wawancara tersebut menyatakan bahwa wali siswa merasa senang karena dapat melihat anak-anak mereka mendapatkan pengajaran secara langsung sehingga pelajaran yang disampaikan menjadi lebih optimal, di sisi lain mereka juga mengkhawatirkan terkait penyebaran virus covid-19 di lingkungan sekolah. Mereka hanya berharap bahwa pihak sekolah dapat menjamin kebersihan, dan protokol kesehatan anak-anak mereka selama dilingkungan sekolah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang yang mana Disdikpora selama periode pemberlakuan PTM sesuai dengan anjuran pemerintah, berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM, sehingga pihak Disdikpora memiliki data terkait sekolah yang rentan untuk menyelenggarakan PTM serta yang sudah terjadi kasus covid-19 di lingkungan sekolah tersebut untuk tidak mengadakan PTM lagi sampai situasi dan kondisi terkendali.

Adapun faktor penghambat dalam penyelenggaraan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada SMPN 2 Telukjambe Timur, Karawang adalah sebagai berikut :

### 1. Kurang disiplin melakukan Prokes

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMPN 2 Telukjambe Timur masih ditemukan banyak pelajar yang masih tidak menjalankan protokol kesehatan dengan tertib seperti tidak menggunakan masker dengan benar, tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak menggunakan *hand sanitizer*.

2. Terdapat 2 Sesi Pembelajaran dimana kondisi tersebut tidak didukung oleh kuantitas tenaga pendidik yang ada.

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas mengharuskan sekolah membatasi jumlah siswa per kelas maksimal 50 persen Berdasarkan hal tersebut 1 kelas kemudian dibagi menjadi 2 sesi. Dimana 2 sesi pembelajaran ini diakui oleh beberapa Guru cukup melelahkan karena harus 2x mengajar di sesi pertama dan sesi kedua. Diakui oleh salah seorang guru bahwa terkadang Guru-Guru sudah kelelahan saat sesi pertama selesai dan berakibat pada kurang efektifnya pembelajaran pada sesi kedua.

## KESIMPULAN

Hasil evaluasi mengenai kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada SMPN 2 Telukjambe Timur Kabupaten Karawang menghasilkan simpulan penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas mampu mengurangi resiko terjadinya *learning loss*. Dengan diberlakukannya PTM Terbatas siswa bisa lebih mengerti materi yang disampaikan guru dan memiliki pengalaman belajar di sekolah meskipun belum maksimal
2. Efisiensi Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 2 Telukjambe Timur sudah dipersiapkan dengan baik sesuai dengan pedoman penyelenggaraan PTM Terbatas.
3. Kecukupan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan *learning loss* karena kebijakan ini hanya memberikan kesempatan belajar disekolah diwaktu yang terbatas dan siswa masih harus tetap belajar daring dari rumah.
4. Pemerataan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

Terbatas ini sudah diikuti oleh hampir seluruh siswa yang artinya kebijakan ini diterapkan secara merata kepada setiap siswa.

5. Responsifitas Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sudah menjawab permasalahan yang ada, dimana dalam hal ini kebijakan PTM terbatas telah mengurangi resiko terjadinya *learning loss*.
6. Ketepatan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sudah tepat untuk dilaksanakan di masa Covid-19 pada periode September sampai februari 2022 dan ditiadakan karena kehadiran varian virus baru yang lebih berbahaya untuk dilakukan PTM sesuai dengan anjuran dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan sejumlah saran bagi penyelenggaraan Kebijakan PTM Terbatas di SMPN 2 Telukjambe Timur, yaitu :

1. Pada dimensi efektivitas penyelenggaraan PTM terbatas ini membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga disarankan bagi pihak sekolah untuk mempertimbangkan dan mengatur kembali jadwal pelajaran disesuaikan dengan kuantitas tenaga pendidik serta sarana prasarana yang dimiliki agar PTM terbatas menjadi lebih efektif.
2. Untuk dimensi efisiensi Sekolah harus terus memastikan bahwa pelajaran yang diberikan kepada siswa dapat diterima dengan baik sehingga kebijakan ini menjadi solusi yang efisien bagi pembelajaran ditengah pandemi.
3. Kecukupan, peneliti menyarankan pihak sekolah untuk mengatur jumlah peserta didik di setiap sesi disesuaikan dengan luas kelas yang dimiliki.
4. Pemerataan, pada dimensi ini peneliti tidak memberikan saran yang signifikan karena implementasiannya

- dapat dilihat secara nyata hampir di setiap sekolah.
5. Responsifitas, untuk mendukung peserta didik menjadi lebih responsive saat mengikuti PTM terbatas maka diharapkan selain inovasi dalam media pembelajaran sekolah juga harus berinovasi dalam menyampaikan pentingnya menjalankan proses kepada siswa agar PTM terbatas bisa terus dilaksanakan.
  6. Ketepatan, kebijakan PTM ini sudah tepat sasaran namun masih ada sedikit kekurangan yaitu pada bagian fasilitas kesehatan yang tidak tepat penempatannya sehingga jarang sekali digunakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41–48. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44>
- Khusnah, J. (2021). *Evaluasi kebijakan terhadap izin reklame di kota batam*. January, 2021.
- Koenjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maelin, E. D., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2018). *Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit ....* <http://eprints.untirta.ac.id/1054/>
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). *Universitas Negeri Makassar*, 1–339.
- [http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR\\_MUHIDDIN.pdf](http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR_MUHIDDIN.pdf)
- Nugroho, R. D. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. PustakaPelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widodo, J. (2007). *Analisa Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia.